

MODUL MATERI 6

➤ **Gagasan dan Gerakan Koperasi di Dunia**

Analisis negara – negara sbb:

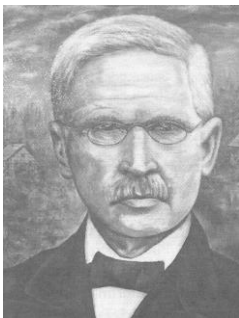
- Eropa : Jerman, Swedia, Denmark, Prancis, Italia, Rusia, Norwegia
- Selandia Baru dan Australia
- Amerika : Amerika Serikat, Kanada
- Afrika : Kenya, Republik Afrika Selatan
- Asia : Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, India, Malaysia, Indonesia

1. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Eropa

Gerakan koperasi yang diprakarsai Robert Owen dan dimotori oleh berbagai kelompok buruh di Inggris berkembang dan menjadi tren baru di bidang ekonomi di berbagai belahan benua, terutama Eropa. Paradigma baru ini merayap ke berbagai negara yang umumnya menganut sistem ekonomi kapitalis, terutama di Jerman dalam bentuk koperasi kredit, di Swedia, Denmark, dan Prancis dalam berbagai bentuk dan jenis koperasi.

➤ JERMAN

Walikota Flammersfeld yang bernama F. W. Raiffeisen (1818- 1888) yang peduli dengan nasib kaum tani memelopori berdirinya koperasi kredit yang diperuntukkan untuk menolong petani dari jeratan ijon dan lintah darat. Pendirian koperasi Flammersfeld ini terutama ditujukan untuk menyatukan kaum petani melalui kegiatan simpan pinjam.



F.W. Raiffeisen, Walikota yang ditujukan untuk kegiatan produktif Flammersfeld, pelopor koperasi simpan pinjam di Jerman

Koperasi ini bergerak dengan mekanisme (Revrison Baswir: 2000) yang meliputi:

1. Anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman bagi anggota yang membutuhkannya dengan membayar bunga ringan. Penggunaan uang yang ditunjukkan untuk kegiatan produktif diawasi.
3. Usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat dan kelompok orang-orang yang saling mengenal agar terbentuk suatu kerja sama yang erat.
4. Pengurusan koperasi diselenggarakan sendiri oleh anggota yang dipilih tanpa mendapat upah.
5. Keuntungan yang diperoleh dari perputaran uang simpanan dimiliki koperasi dan dipergunakan untuk membantu kesejahteraan rakyat setempat.

Selain F. W. Raiffeisen, pelopor koperasi lainnya di Jerman adalah Hermann Schulze (1809- 1883). Schulze yang seorang hakim di Delitzsch mendorong pengusaha dan pengrajin kecil untuk menyatukan diri dan mendirikan koperasi kredit di perkotaan guna menghadapi desakan industri-industri besar. Koperasi ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan koperasi ala Schulze-Delitzsch yang menggabungkan nama Schulze dengan nama kota Delitzsch.



Hermann Scutze

Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1968 telah berdiri sebanyak 425 buah koperasi kredit di Jerman. Selain diperuntukkan bagi pengadaan kredit, koperasi di Jerman umumnya juga mengadakan peralatan, benih, dan berbagai jasa untuk kegiatan pertanian.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Sebagai pusat lahirnya koperasi kredit dunia, Jerman memiliki beberapa bank koperasi yang kinerjanya memiliki predikat sangat baik, salah satunya adalah Deutsche Zentralgenossenschaft Bank atau yang lebih dikenal dengan Bank DZ yang menduduki peringkat lima besar bank di Jerman. Sekitar 60% pangsa pasar kredit di negara berpenduduk sekitar 85 juta jiwa ini dikuasai oleh koperasi. Ini artinya, lebih besar dari bank swasta terkenal seperti Deutsche Bank atau Dresdner Bank. Bank DZ sendiri memiliki 14.000 cabang yang tersebar di seantero Jerman.

Jerman menempatkan 26 koperasi terbaiknya dalam 300 koperasi terbaik dunia. Beberapa di antaranya adalah ReWe Group (Zentral Aktiengesellschaft FU) yang bergerak di bidang ritel, DZ Bank Group yang bergerak di bidang perbankan, Edeka Zentrale AG yang bergerak di bidang ritel, dan R+V Versicherung AG yang bergerak di bidang asuransi.

➤ **SWEDIA**

Polopop koperasi di Swedia bernama Albin Johansson. Salah satu gebrakan spektakuler Johansson adalah menasionalisasi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaringan minyak bumi dan dikelola secara efisien oleh koperasi. Dukungan koperasi di Swedia untuk negara ditunjukkan dengan PDB sebesar 13% dari PDB nasional, di samping menyumbangkan kesempatan kerja bagi rakyat dan menyelenggarakan berbagai program rehabilitasi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, di Swedia juga berkembang koperasi konsumen dan mereka bahkan mampu mendirikan pabrik sendiri. Dalam mengelola usahanya, koperasi konsumen di Swedia mempunyai lembaga usaha hipermarket sendiri. Hal itu membuat para produsen dan importir justru meminta agar koperasi menjadi distributor bagi produknya sehingga koperasi membeli barang konsumsi dalam jumlah besar dan mendapat potongan harga dan kredit. Potongan harga dan kredit ditawarkan oleh pabrikan dan importir, bukan diminta oleh koperasi konsumen karena pasar eceran dikuasai oleh koperasi.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Di Swedia lahir pusat koperasi Swedia atau Swedish Cooperative Centre (SCC). SCC berbentuk seperti sebuah federasi nasional yang mewakili seluruh koperasi besar dan beberapa sektor koperasi lainnya di Swedia. SCC memiliki 62 anggota organisasi koperasi konsumen, federasi petani, dan organisasi koperasi perumahan. SCC menerapkan cara kerja kolaboratif dengan anggota organisasi. Federasi menyediakan sumber keuangan melalui pembiayaan keuangan untuk pengembangan program, terutama bagi pemberantasan kemiskinan dan memerangi monopoli.

Saat ini terdapat 5 (lima) koperasi terbaik yang dicatatkan Swedia dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA, yaitu Lantmönnen yang bergerak di bidang pertanian, KF Group (The Swedish Cooperative Union) yang bergerak di bidang ritel, Länsförsäkringar yang bergerak di bidang asuransi/ Folksam yang bergerak di bidang asuransi, dan Sodra Skogsagarna yang bergerak di bidang pertanian.

➤ **DENMARK**

Pada tahun 1866, Hans Christian Sonne bersama F. F, Ulrich memelopori berdirinya koperasi konsumsi bagi kaum buruh di kota Tristed Jutland, Denmark. Koperasi ini terus mengalami perkembangan dengan pesat diikuti munculnya koperasi-koperasi lain di seluruh pelosok Denmark. Secara menakjubkan, koperasi-koperasi di Denmark berkembang dengan luar biasa dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi Denmark. Pertokoan dan bank di Denmark hampir semuanya milik koperasi. Baik di ibukota Denmark, Kopenhagen, maupun di kota-kota besar lainnya, hampir tidak ada department store maupun toko serba ada yang besar. Tidak heran jika Denmark mendapat julukan The Mecca of Cooperative

World karena koperasi tumbuh dan berkembang dengan begitu pesat di negara monarki konstitusional ini. Meskipun Denmark tidak memiliki lahan yang luas untuk kegiatan pertanian, tetapi kegiatan pertanian dapat dipersatukan melalui koperasi, termasuk dalam distribusi hasil-hasil pertanian.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Pada saat ini koperasi konsumen menguasai 37% pasar ritel nasional, 96% produksi susu, produksi daging, dan 50% produksi telur. Jumlah anggota koperasi di Denmark saat ini mencapai 30% dari total penduduk Denmark.

Denmark mencatatkan beberapa koperasi terbaiknya dalam koperasi terbaik dunia versi ICA, yakni Arla Foods yang bergerak di bidang pertanian, Danish Crown yang bergerak di bidang pertanian, DLG Group yang bergerak di bidang pertanian, dan PFA Pension yang bergerak di bidang asuransi.

➤ **PRANCIS**

Goncangan sosial dan ekonomi yang diderita kaum buruh dan masyarakat kelas bawah yang tertindas di Prancis mendorong Charles Fourier, Louis Blanc, dan Henri de Saint-Simon mencari alternatif terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi di Prancis. Dengan berbagai gagasan, keempat tokoh ini ternyata mampu menyadarkan dan membuka cakrawala baru rakyat Prancis terhadap arti penting berkoperasi sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap kapitalisasi ekonomi dan distorsi pasar yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Charles Fourier (1772- 1837) adalah menganjurkan berdirinya berbagai unit produksi (falansteires) yang mengedepankan semangat kebersamaan dalam kepemilikan aset, mengupayakan kebutuhan sendiri, dan kepemilikan terhadap alat-alat produksi secara bersama-sama. Meskipun Louis Blanc (1811-1882) terpengaruh oleh cita-cita Charles Fourier, tetapi ia lebih realistis dengan menyusun rencana yang lebih konkret.

Louis Blanc mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan tempat-tempat kerja untuk kaum buruh dalam bentuk tempat kerja berlandaskan aspek sosial (atelier sociaux), di mana kaum buruh mengorganisasi sendiri pekerjaan mereka dengan cara kooperatif dan diawasi oleh pemerintah. Selain mendapatkan upah kerja, kaum buruh juga mendapat bagian dari laba usaha. Henri de Saint-Simon (1760-1825) berpendapat bahwa masalah sosial dapat diatasi jika masyarakat diatur menjadi "Assosiasi Produktif" yang dipimpin teknokrat dan ahli-ahli industri.

Koperasi Prancis juga mencatatkan prestasi yang sangat baik dalam catatan ICA. Terbukti, Prancis menyumbangkan 46 koperasinya di dalam daftar koperasi terbaik versi ICA pada tahun 2012. Berikut ini daftar koperasi-koperasi Prancis yang berkinerja baik.

Tabel 2.1.

Koperasi Terbaik Prancis yang Masuk ke dalam Koperasi Terbaik Dunia Versi ICA

No	Nama	Sektor	Penghasilan (US\$ miliar)
1.	Credit Agricole Group	Perbankan/Persekutuan Kredit	103,58
2.	Groupe Caisse D'Epargne	Perbankan/Persekutuan Kredit	58,54
3.	Confédération Nationale du Crédit Mutuel	Perbankan/Persekutuan Kredit	56,69
4.	E. Leclerc (S.C. Galec)	Barang Konsumsi/Ritel	48,30
5.	Groupe Banques Populaires	Perbankan/Persekutuan Kredit	29,39
6.	Système U	Barang Konsumsi/Ritel	24,95
7.	Groupama	Asuransi	21,72
8.	Covea	Agrobisnis/Kehutanan	17,74
9.	La Mondiale Groupe	Asuransi	8,00
10.	Invivo	Agrobisnis/Kehutanan	7,35
11.	Coopératif Terrena Group	Agrobisnis/Kehutanan	5,43
12.	Tereos	Agrobisnis/Kehutanan	5,31
13.	Coopérative d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques de Rouens	Barang Konsumsi/Ritel	4,89
14.	Groupe Chèque Déjeuner	Barang Konsumsi/Ritel	4,50
15.	MAIF Group	Asuransi	4,07
16.	Sodiaal union	Agrobisnis/Kehutanan	3,82
17.	SMABTP	Asuransi	2,87
18.	Gedex (Gedimat)	Pekerja/Industri	2,84
19.	Coopagri Bretagne	Agrobisnis/Kehutanan	2,72
20.	Agrial	Agrobisnis/Kehutanan	2,66
21.	Champagne Cereales	Agrobisnis/Kehutanan	2,54
22.	Epis Centre (Axéreal)	Agrobisnis/Kehutanan	2,46
23.	Cooperl Hunaudaye	Agrobisnis/Kehutanan	2,37
24.	PROMAFRANCE (Bigmat)	Pekerja/Industri	1,95
25.	Groupe MACSF	Asuransi	1,88
26.	Cristal Union	Agrobisnis/Kehutanan	1,85
27.	Limagrain	Agrobisnis/Kehutanan	1,81
28.	CECAB Group	Agrobisnis/Kehutanan	1,81
29.	Selectour voyages	Barang Konsumsi/Ritel	1,81
30.	Groupe Eurialis	Agrobisnis/Kehutanan	1,79
31.	Azur GMF	Asuransi	1,74
32.	Groupe Even	Agrobisnis/Kehutanan	1,60
33.	Groupe Intersport	Barang Konsumsi/Ritel	1,54
34.	Coop Atlantique	Barang Konsumsi/Ritel	1,32
35.	Coopérateurs Normandie Picardie Point Coop Maxicoop Viking	Barang Konsumsi/Ritel	1,28
36.	Coop Atlantique	Barang Konsumsi/Ritel	1,25
37.	Groupe Coopératif Maisadour	Agrobisnis/Kehutanan	1,25

38.	Agralys	Agrobisnis/Kehutanan	1,22
39.	Groupe Coop Alsace	Barang Konsumsi/Ritel	1,13
40.	Credit Cooperatif	Perbankan/Persekutuan Kredit	1,13
41.	UNEA Group	Agrobisnis/Kehutanan	1,07
42.	GLAC	Agrobisnis/Kehutanan	1,02
43.	Alliance Agro-Alimentaire (3A Groupe)	Agrobisnis/Kehutanan	0,95
44.	Eurial Poitouaine	Agrobisnis/Kehutanan	0,90
45.	Groupe Orcab	Pekerja/Industri	0,82
46.	CAVAC	Agrobisnis/Kehutanan	0,77

Sumber: ICA (2012)

➤ **ITALIA**

Awal berkembangnya koperasi di Italia banyak dipengaruhi oleh koperasi kredit di Jerman (M. Iskandar Soesilo, 2008). Pada tahun 1866, Luzzatti, seorang negarawan yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, membentuk koperasi kredit di luar kota Milan yang diberi nama Bance Popolari (seperti Bank Rakyat). Koperasi ini berbentuk seperti model koperasi kredit model Schulze-Delüsch di Jerman. Italia mencatatkan 30 koperasi terbaik di negaranya dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

Hal yang membedakan koperasi di Italia dengan koperasi di negara lain adalah selain bergerak di bidang agrikultur, perbankan, dan ritel, koperasi di Italia juga bergerak di bidang industri. Beberapa koperasi Italia yang bergerak di bidang industri, di antaranya adalah Consorzio Cooperative Costruzioni, SACMI, Manutencoop, CCPL (Consortium Coop. Produz Lav.S.c.r.i), dan CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti). Kelima koperasi yang bergerak di bidang industri tersebut juga masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia.

Tabel 2.2.

Koperasi Italia yang Masuk ke dalam 300 Koperasi ICA

No	Nama	Sektor	Penghasilan (US\$ miliar)
1.	Cattolica Assicurazioni	Asuransi	5,32
2.	Unicoop Firenze	Ritel	3,43
3.	Co-op Adriatica	Agrobisnis	2,68
4.	Coop Consorzio Nord Ovest	Lainnya	2,48
5.	Societa Reale Mutua di Assicurazioni	Asuransi	2,44
6.	PAC.2000 A.	Ritel	2,14
7.	Coop Estense	Ritel	1,80
8.	UNIPOL	Perbankan	1,76
9.	Consorzio Cooperative Costruzioni	Perindustrian	1,70
10.	SACMI	Perindustrian	1,63
11.	Unicoop Tirreno	Ritel	1,62
12.	Conad del Tirreno	Ritel	1,56
13.	Coop Lombardia	Ritel	1,47

14.	Granlatte	Agrobisnis	1,38
15.	Novacoop	Ritel	1,37
16.	Coop Consumatori Nordest	Ritel	1,30
17.	CAMST	Agrobisnis	1,13
18.	Manutencoop	Perindustrian	1,11
19.	Nordiconad	Ritel	1,07
20.	Conad Romagna (Commercianti Indipendenti Associati)	Ritel	1,06
21.	Coop Liguria	Ritel	1,00
22.	CCPL (Consortium Coop. Produz Lav.S.c.r.i)	Perindustrian	0,99
23.	CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti)	Perindustrian	0,98
24.	Conad (Conorzio Nazionale Dettaglianti)	Ritel	0,95
25.	Conad Centro Nord	Ritel	0,88
26.	Coop Centro Italia	Ritel	0,82
27.	Conorzio Nazionale Servizi - CNS	Ritel	0,78
28.	Conad Adriatico	Ritel	0,75
29.	Coopservice Societa Cooperativa per Azioni Abbreviabile in Coopservices	Ritel	0,73
30.	Grandi Salumifici Italiani	Lainnya	0,69

Sumber: ICA (2012)

➤ **RUSIA**

Gerakan koperasi di Rusia diawali dengan bentuk pengelolaan pertanian yang disebut dengan ko/khoz, yaitu sebuah komoditas yang mengelola lahan pertanian secara bersama-sama dengan jumlah sekitar 75 keluarga. Kolkhoz merupakan sebuah bentuk komoditas ala Robert Owen di Inggris atau ala falansteires atau ala Charles Fourier di Prancis.

Koperasi pertama di Rusia berdiri pada tahun 1854 pada masa pemerintahan kekaisaran Tsar. Koperasi di Rusia umumnya didirikan oleh kaum buruh, terutama dalam bentuk koperasi konsumsi. Namun pada periode ini koperasi tidak dapat berkembang karena selalu dicurigai dan mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Ketika terjadinya revolusi fisik pada tahun 1905-1914, koperasi berkembang dengan cukup baik di Rusia. Hal ini ditunjukkan dengan begitu banyaknya koperasi yang tumbuh saat itu yang mencapai angka 10.000 koperasi dan dengan jumlah anggota yang mencapai 1 juta orang (M. Iskandar Soesilo, 2008). Akan tetapi ketika kaum komunis memenangkan revolusi, gerakan koperasi justru mengalami kemunduran total karena mendapat tekanan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Tekanan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah mulai sedikit berkurang ketika Lenin mendekritkan politik ekonomi baru pada tahun 1921 yang dikenal dengan New Economic Policy. Gerakan ekonomi baru ini dilakukan guna mendorong produksi secara besar-besaran serta menasionalisasikan kegiatan ekonomi, baik swasta maupun koperasi. Pada masa pemerintahan Lenin, koperasi mendapat berbagai fasilitas dan bantuan dari

pemerintah. Tidak heran jika koperasi maju dan berkembang pada masa pemerintahan Lenin dan mampu bersaing secara setara dengan swasta. Saat itu terdapat 12.000 koperasi pertanian dan lebih dari 1.000 koperasi kredit di 12 wilayah ekonomi Rusia.

➤ **NORWEGIA**

Norwegia merupakan salah satu negara yang koperasinya cukup berkembang. Hal ini dibuktikan dengan masuknya empat koperasi Norwegia ke dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA. Keempat koperasi itu, yaitu Gilde yang bergerak di bidang pertanian, TINE BA yang bergerak di bidang pertanian, Gjensidige Forsikring yang bergerak di bidang asuransi, dan KLP Insurance yang bergerak di bidang asuransi.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Koperasi susu berkontribusi 99% dari total produksi susu, koperasi nelayan menyumbang 8,7% dari total ekspor produk perikanan, dan koperasi kehutanan menghasilkan 76% kayu di Norwegia (Herjuno Ndaru Kinasih, 2013). Tercatat 1,5 juta dari 14,5 juta penduduk Norwegia adalah anggota koperasi. Selain memperjuangkan kepentingan anggotanya, koperasi juga merupakan lembaga keuangan yang mampu menyediakan jasa keuangan. Selain koperasi, bisnis sumber daya alam di Norwegia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan negara, seperti Statoil, DNB, dan Telenor. Pemerintah Norwegia mengontrol 3116% dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek,

2. Gagasan dan Gerakan Koperasi di SELANDIA BARU dan AUSTRALIA

Koperasi di Australia dan Selandia Baru umumnya bergerak di bidang agrobisnis dan peternakan. Produk yang dihasilkan terutama susu, daging, dan kerajinan yang diolah dari hasil peternakan sapi, biri-biri, maupun kambing.

Saat ini, di Selandia Baru terdapat koperasi yang bernama Fonterra yang bergerak di bidang industri pengolahan susu yang menduduki peringkat 33 koperasi terbaik dunia versi ICA tahun 2012. Gabungan dari berbagai koperasi yang didirikan pada tahun 2001 ini diawali dengan kerja sama peternak-peternak susu sejak tahun 1800. Industri ini kemudian diperluas untuk membentuk sebuah koperasi susu terbesar di dunia.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Koperasi Fonterra yang mempunyai sekitar 15 ribu karyawan ini dapat memasok 11 miliar liter susu setiap tahunnya ke petani-petani susu yang tersebar di Selandia Baru dengan nilai omzet sebesar 19,5 miliar dollar Selandia Baru per tahun. Volume penjualan tercatat sebesar 2,63 metrik ton dengan konsumen mencapai 140 negara. Hasil yang luar biasa ini tidak didapatkan begitu saja oleh Fonterra Cooperative Group. Fonterra selalu memerhatikan empat aspek dalam menjalankan usahanya.

Keempat aspek tersebut adalah memastikan Fonterra adalah koperasi susu dengan biaya terendah di dunia, membangun kemitraan dengan kepercayaan pelanggan, mengamati pertumbuhan penjualan susu di pasar-pasar lokal, dan koperasi Fonterra membuat produk pilihan pertama yang sangat digemari pelanggan dan konsumen di negara manapun. Unit usaha Fonterra Cooperative Group terdiri dari berbagai unit usaha. Fonterra memiliki empat segmen bisnis yang ditentukan oleh jenis produk dan wilayah geografis, yakni komoditas dan bahan (meliputi New Zealand Milk Supply dan New Zealand Manufacture), penjualan dan operasional perencanaan, Fonterra Global Trade, Global Supply Chain yang beroperasi di Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika.

Selain Fonterra, terdapat 5 koperasi di Selandia Baru yang masuk ke dalam daftar 300 koperasi terbaik dunia, yaitu Foodstuffs Ltd. (South Island) yang bergerak di bidang ritel, Foodstuffs (Wellington) Cooperative Society Ltd. yang bergerak di bidang ritel, PPCS Ltd. yang bergerak di bidang pertanian/perhutanan, Foodstuffs (Auckland) Ltd. yang bergerak di bidang ritel, dan Alliance Group Ltd. yang bergerak di bidang agrikultur/perhutanan.

Sementara itu di Australia, tidak kurang tercatat sebanyak empat koperasi masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia, yaitu: RZB yang bergerak di bidang perbankan/kredit, Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd. yang bergerak di bidang agrobisnis/kehutanan, Dairy Farmers Group yang bergerak di bidang agrobisnis/kehutanan, dan HBF yang bergerak di bidang perbankan/kredit.

3. Gagasan dan Gerakan Koperasi di AMERIKA

Gerakan koperasi di belahan benua Amerika terutama berkembang di Amerika Serikat, Kanada, dan Kolombia. Gerakan koperasi secara fantastis menunjukkan peranan yang cukup signifikan dalam membangun ekonomi di negara-negara tersebut.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Koperasi di Amerika lebih mengikuti sistem ekonomi yang berlaku di benua tersebut sehingga tidak heran jika koperasi di Amerika lebih bersifat kompetitif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Gerakan koperasi yang memiliki kekuatan komparatif tidak begitu dominan di benua Amerika.

➤ AMERIKA SERIKAT

Koperasi di Amerika Serikat dimotori oleh Edward A. Filene (1860-1937). Ia mempelopori berdirinya koperasi simpan pinjam di seluruh Amerika Serikat, khususnya bagi petani dan buruh. Perjuangan Desjardin dan Filene bersama kaum buruh di Amerika Serikat melahirkan beberapa undang-undang di beberapa negara bagian, di antaranya adalah di Michigan pada tahun 1863, di Massachusetts pada tahun 1866, dan di Wisconsin pada tahun 1887.

Selanjutnya pada tahun 1923, Pemerintah Federal mengeluarkan undang-undang tentang pemberian kredit yang dinilai mendukung kredit bagi petani yang bernaung di koperasi serta melahirkan 12 bank koperasi regional dan bank koperasi pada tingkat federal/nasional.

Meskipun Amerika Serikat terkenal sebagai negara utama penggagas kapitalis, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa lebih dari 30 koperasi di Amerika Serikat memiliki sisa hasil usaha (SHU) hingga US\$ 1 miliar. Pada 2003, 100 koperasi terbaik di AS memiliki total SHU sampai US\$ 117 miliar. Hampir 30% produk pertanian AS dijual melalui koperasi pertanian yang berjumlah lebih dari 3.400 unit.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Mengutip Djabaruddin Djohan (2009), pada tahun 1908 di AS, nama "Sunkist" ditetapkan untuk menyebut buah jeruk yang bermutu tinggi. Sunkist kemudian menjadi nama dagang (trademark) koperasi pemasaran jeruk ini yang anggotanya tidak hanya para petani jeruk di California, tetapi juga di Arizona. Pada tahun 1952, koperasi pemasaran jeruk ini resmi menyandang nama Sunkist Growers (petani jeruk Sunkist) yang kemudian berkembang menjadi salah satu dari 10 koperasi pemasaran terbesar di Amerika Serikat dan koperasi pemasaran terbesar di dunia dalam bidang industri buah-buahan dan sayur-mayur. Sunkist Growers menempati peringkat 229 versi Global 300 ICA pada tahun 2007. Sunkist adalah koperasi pemasaran yang dimiliki oleh dan dioperasikan untuk kepentingan 6.000 petani jeruk anggotanya. Koperasi ini merupakan salah satu dari 10 koperasi pemasaran terbesar di Amerika Serikat sedangkan dalam sektor pemasaran industri buah dan sayur-mayur Sunkist Growers merupakan koperasi pemasaran terbesar di dunia.

Pada tahun 2012, AS mencatatkan 91 koperasinya dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA. Beberapa koperasi tersebut adalah CHS Inc. yang bergerak di bidang pertanian, Nationwide Mutual Insurance Company yang bergerak di bidang asuransi, Land O'Lakes yang bergerak di bidang agrobisnis, Dairy Farmers of America yang bergerak di bidang agrobisnis, Wakefern Food Corp. yang bergerak di bidang ritel, Associated Wholesale Grocers yang bergerak di bidang ritel, Growmark Inc. yang bergerak di bidang agrobisnis, Federal Farm Credit Banks Funding Corporation yang bergerak di bidang perbankan, dan Ag Processing Inc. yang bergerak di bidang agrobisnis.

Dari 91 koperasi asal AS yang masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia, 24 koperasi di antaranya bergerak di bidang agrobisnis. Tidak heran jika selain dikenal sebagai negara industri, AS juga dikenal sebagai negara agrobisnis karena banyaknya ekspor produk agrobisnis, termasuk ke Indonesia.

➤ **KANADA**

Penggerak awal koperasi di Kanada adalah Moses Michael Coady (1882-1959) dengan mendirikan Coady International Institute (CII) yang ditujukan untuk memberikan pendidikan koperasi bagi warga Kanada. Gerakan yang dilakukan Coady memicu perkembangan

koperasi di Kanada, di antaranya ditunjukkan dengan berdirinya Canadian Cooperative Association (CCA) pada 1987 dengan tujuan mempromosikan koperasi sebagai perusahaan yang demokratis dan berorientasi pada rakyat.

Aktivitas CCA sendiri adalah menyelenggarakan pendidikan, mengadakan riset, mewakili sektor koperasi di lembaga pemerintah dan sektor publik, mempromosikan perkembangan koperasi Kanada ke luar negeri, dan sebagainya. Salah satu prinsip koperasi universal yang dirumuskan pada tahun 1995 adalah kerja sama antarkoperasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Untuk tujuan tersebut, CCA melaksanakan program pembangunan koperasi di kancah internasional, termasuk bekerja sama dengan mitra lokal. CCA beranggapan bahwa dalam menghadapi pasar bebas yang akan datang, penting bagi koperasi-koperasi untuk bekerja sama membentuk persekutuan strategis agar dapat bertahan dalam persaingan dan dapat lebih berkembang.

Tabel 2.3 memperlihatkan lima besar koperasi non-keuangan di Kanada yang berkembang dengan sangat baik hingga saat ini.

Lima Besar Koperasi Non-Keuangan di Kanada Berdasarkan Omzet dan Aset Tahun 2006

No	Nama	Total Omzet	Total Aset	Kegiatan Utama
1	Federated Co-operatives Limited.	5.413.759.000	2.682.699.000	Grosir, barang konsumsi, penyulingan minyak, bahan-bahan bangunan
2	La Coop Fédérée	3.175.543.749	1.004.006.000	Makanan, minyak, bahan-bahan baku keperluan petani
3	Agropur Coopérative	2.284.117.000	845.342.000	Produk-produk makanan, seperti susu, dll.
4	United Farmers of Alberta Co-operative Limited	1.624.058.000	549.361.000	Minyak, bahan-bahan kebutuhan produksi pertanian/petani, bahan-bahan bangunan
5	Calgary Co-op Association Ltd. (Alta.)	925.959.000	313.785.000	Supermarket, minyak, farmasi, biro perjalanan

Sumber: [https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/top_50_2006_e.pdf/\\$file/top_50_2006_e.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/top_50_2006_e.pdf/$file/top_50_2006_e.pdf)

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Saat ini empat dari sepuluh warga negara Kanada adalah anggota dari minimal satu koperasi. Bahkan di Quebec, tidak kurang dari 70% penduduknya merupakan anggota koperasi, sementara di provinsi Saskatchewan terdapat 56% penduduk yang menjadi anggota koperasi. Menurut catatan ICA, koperasi di Kanada menyumbang 35% dari total produksi gula *maple* dunia.

Kanada mencatatkan delapan koperasi terbaiknya di dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA, yakni Desjardins Group yang bergerak di bidang perbankan, Federated Cooperatives Limited yang bergerak di bidang ritel, Coopérative Fédérée du Québec yang bergerak di bidang agrobisnis, The Co-operators yang bergerak di bidang asuransi, Agropur yang bergerak di bidang agrobisnis/kehutanan, United Farmers of Alberta yang bergerak di

bidang agrobisnis, La Capitale yang bergerak di bidang asuransi, dan Calgary Cooperative yang bergerak di bidang ritel.

4. Gagasan dan Gerakan Koperasi di AFRIKA

Meskipun pada tahun 2012 tidak ada koperasi terbaik Afrika yang masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia, tetapi dalam General Assembly yang diselenggarakan ICA pada tahun 2007 menyatakan bahwa gerakan koperasi di Afrika, terutama di Kenya dan Republik Afrika Selatan, berkembang dengan cukup baik. Beberapa catatan penting terhadap perkembangan koperasi di Afrika adalah sebagai berikut.

➤ **KENYA**

Di Kenya, bisnis koperasi memberikan kontribusi ¹-15% terhadap PDB dan 3 1% tabungan nasional. Koperasi juga mendominasi pangsa pasar kopi sebesar 70%, susu 76%, kayu 90%, dan kapas 95%.

➤ ***Republik Afrika Selatan***

Afrika Selatan memiliki lahan pertanian yang luas dan menjadi negara eksportir hasil-hasil pertanian. Ada lebih dari 1.000 koperasi pertanian dan bisnis pertanian di seluruh Afrika Selatan.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Ekspor pertanian menyumbang 8% dari total ekspor Afrika Selatan untuk lima tahun terakhir. Industri di bidang pertanian berkontribusi dengan menyerap 10% pekerja formal (relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di Afrika), menyediakan lapangan kerja untuk para buruh, dan berkontribusi sekitar 2,6% dari PDB negara. Bagaimanapun juga dalam kaitannya dengan kemampuan lahan, hanya yang dapat dipergunakan untuk lahan produksi dan hanya 3% lahan dengan potensi yang tinggi.

Walaupun sektor pertanian relatif berkembang dengan baik, orang-orang di area pedesaan tetap bertahan dengan pertanian subsisten. Afrika Selatan adalah produsen anggur terbesar kedelapan di dunia dan merupakan produsen terbesar kesebelas untuk benih bunga matahari. Afrika Selatan adalah jaringan pengekspor hasil-hasil pertanian dan bahan makanan, barang-barang yang diekspor adalah gula, buah anggur, buah jeruk, nectarines, dan buah-buahan musiman. Hasil dari pertanian lokal yang terbesar adalah gandum (jagung) dan diperkirakan menghasilkan 9 juta ton tiap tahunnya, dengan jumlah 7,4 ton dikonsumsi sendiri. Peternakan juga sangat terkenal di Afrika Selatan dengan produksi

negara sebesar 85% dari total konsumsi daging. Industri susu terdiri dari sekitar 4.300 produsen susu yang dapat menyerap 60.000 pekerja pertanian dan mendukung mata pencaharian untuk 40.000 orang yang lainnya.

5. Gagasan dan Gerakan Koperasi di ASIA

Koperasi di Asia berkembang cukup baik sebagaimana di negara asalnya. Ini dikarenakan, selain koperasi dapat mewadahi berbagai kegiatan UMKM, koperasi juga cocok dengan nuansa ketimuran yang menonjolkan sikap saling tolong-menolong dan rasa kekeluargaan dalam pranata sosialnya. Koperasi di Asia terutama tumbuh subur di Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Singapura, dan Malaysia.

➤ **JEPANG**

Cikal bakal koperasi di Jepang diawali dengan gerakan mujin pada tahun 1275 dan masih populer hingga saat ini. Cara kerja mujin adalah dengan mengumpulkan iuran dari anggota dan diundi secara periodik. Bagi anggota yang sudah memperoleh hasil undian, tidak diikutsertakan lagi pada periode undian berikutnya. Pada tahun 1869, organisasi mujin dibenahi berdasarkan kaidah-kaidah koperasi. Selain mujin, di Jepang terdapat pula perkumpulan hotokhusa yang dipelopori Nimony Soutsuku. Hotokhusa merupakan koperasi kredit yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi petani dan usaha kecil.

Setelah terbit undang-undang koperasi pada tahun 1974, berbagai jenis koperasi, di antaranya koperasi pertanian, koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan bank koperasi, tumbuh subur di Jepang.

Dalam bidang pertanian, koperasi di Jepang menghasilkan bisnis senilai US \$90 miliar dan 91% petani Jepang merupakan anggota koperasi. Jepang juga menempatkan delapan koperasi raksasanya di peringkat 300 koperasi terbaik dunia berdasarkan ICA. Dua di antaranya bahkan menduduki peringkat tiga dan lima, yaitu Zen Noh sebuah koperasi pertanian yang beromzet US\$63.449.000.000 dan memiliki aset US\$18.357.000.000, serta Zenkyoren, koperasi asuransi yang beromzet US\$6.819.000.000 dan memiliki aset US\$406.224.000.000.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Zen Noh berdiri pada 30 Maret 1972 dan merupakan hasil penggabungan dua koperasi sekunder pertanian level nasional, yaitu Zenkoren (yang bergerak dalam pengadaan kebutuhan pertanian) dan Zenhanren (bergerak di bidang pemasaran produk pertanian). Dalam operasionalnya (Pudjiatmoko, 2009), Zen Noh menghimpun 1.173 koperasi pertanian dengan 1010 di antaranya merupakan koperasi primer pertanian. Sisanya merupakan koperasi sekunder pertanian tingkat provinsi dan federasi koperasi lain yang terkait dengan bidang pertanian dan peternakan. Hampir

semua kebutuhan petani Jepang dipenuhi melalui koperasi (umumnya disebut JA atau Nohkyo). Koperasi membantu petani mulai dari pengadaan berbagai peralatan dan input pertanian, permodalan sampai pemasaran produk pertanian. Bahkan, kebutuhan barang sehari-hari pun diperoleh lewat koperasi.

Dengan jaringannya, koperasi pertanian Jepang menangani sektor pertanian dari hulu sampai hilir, termasuk sektor pendukungnya, seperti keuangan dan asuransi. Pada awalnya, tanaman pertanian yang menjadi perhatian adalah padi. Total produksi beras yang dihasilkan rata-rata mencapai 1,58 juta ton per tahun.

Namun pada perkembangan selanjutnya, koperasi juga mengarahkan petani untuk melakukan diversifikasi tanaman. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi over supply beras sehingga harganya jatuh. Koperasi selalu mengupayakan agar harga setiap komoditas di tingkat petani tetap tinggi sesuai dengan standar hidup di Jepang.

➤ **KOREA SELATAN**

Tidak terlalu berbeda dengan Jepang, awal perintisan koperasi di Korea Selatan dimulai dari kredit di pedesaan sejak tahun 1907 dan koperasi pertanian mulai berdiri pada tahun 1936. Sejak 1961, berbagai lembaga koperasi di Jepang digabungkan dalam sebuah wadah, yaitu National Agricultural Cooperative Federation (NACF) yang beranggotakan 1.545 koperasi pertanian, 145 koperasi kerajinan, dan 104 koperasi nelayan. Sebanyak 60% penduduk Korea Selatan adalah anggota dari minimal 1 koperasi.

NACF yang sejak awal hingga saat ini tetap setia sebagai koperasi pertanian yang dapat mengembangkan usaha pelayanan dalam berbagai bidang, baik dalam produksi, pemasaran, distribusi, serta jasa keuangan (perbankan dan asuransi) tanpa melupakan faktor pendukungnya (diklat dan media massa). Dengan tetap berfokus pada pelayanan kepada anggota, kegiatan NACF tidak hanya berkembang pada tingkat nasional, tetapi juga meluas ke tingkat internasional.

Menurut Global 300 ICA, turnover NACF mencapai US\$24,687 juta dengan aset sebesar US\$ 199,783 juta. NACF beranggotakan 1.384 koperasi primer (1.278 koperasi regional padi-padian dan 109 koperasi komoditas khusus: sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya) dengan anggota perorangan sebanyak 2.411.272 orang dan memiliki karyawan sebanyak 15.622 orang. NACF menempati posisi nomor 9 dalam 300 koperasi terbaik dunia tahun 2012. Di samping faktor keuangan, kinerja tanggung jawab sosialnya (cooperative social responsibility) juga menjadi pertimbangan dalam menempatkan NACF pada nomor urut 9 Global 300 ICA.

➤ **TIONGKOK**

Salah satu koperasi yang terkenal di Tiongkok adalah Supply and Marketing Cooperative (SMC) yang berperan penting dalam melakukan pengadaan untuk semua kebutuhan usaha tani seperti bibit, pupuk, peralatan, serta pemasaran komoditas pertanian yang dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan SMC dilakukan secara sangat efisien karena SMC sudah membentuk jaringan yang sangat luas dan solid. Di level nasional, koperasi petani tersebut mempunyai koperasi sekunder bernama All-China Federation of Supply and Marketing Cooperatives (ACFSMC).

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Secara keseluruhan, ACFSMC menghimpun 22.537 SMC dengan anggota perorangan mencapai 160 juta petani (Husni Rasyad, 2009). Jaringan ini tersebar di 31 provinsi, 336 prefektur, dan 2.370 federasi desa. Dengan memanfaatkan jaringannya, ACFSMC menguasai lebih dari 60% perdagangan pupuk dan pestisida. Untuk memaksimalkan jaringannya, koperasi ini kemudian melebarkan sayap bisnisnya hingga merambah ke bidang ritel, mulai dari tingkat grosir sampai eceran. Tercatat 1,504 toko grosir dan 89 ribu gerai milik koperasi yang mendukung bisnis menggunakan bendera Sugu Supermarket, Co. Ltd. Selain mengekspor, ACFSMC juga melakukan impor berbagai produk yang dibutuhkan di Tiongkok. Sebagai gambaran, volume ekspor yang dicetak pada 2005 mencapai US\$3 miliar, sedangkan impor US\$2 miliar.

Pada tahun 2012, terdapat 2 (dua) koperasi terbaik Tiongkok yang masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA, yaitu China National Agricultural Means of Production Group Corporation yang bergerak di bidang agrobisnis dan menempati peringkat 44; dan Cooperative Bank yang bergerak di bidang perbankan pada peringkat 138.

➤ **SINGAPURA**

Koperasi konsumen di Singapura menguasai 55% pasar supermarket dengan total volume usaha mencapai US\$700 juta. Keberhasilan koperasi di Singapura ditunjukkan dengan The National Trade Union Congress (NTUC) Fairprice yang menyodorkan fakta dahsyat tentang dominasi koperasi dalam bisnis ritel di Singapura. Di negeri ini, Fairprice telah menjelma menjadi jaringan supermarket paling besar dengan 200 gerai supermarket terkemuka. Kepemilikan jaringan supermarket tersebut menempatkan Fairprice di urutan pertama peritel di Singapura yang sulit ditandingi oleh perusahaan ritel lain. Bahkan oleh raksasa ritel dunia seperti Carrefour.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Sepanjang 2006, total omzet jaringan supermarket Fairprice mencapai US\$ 1,43 miliar dan Fairprice melayani lebih dari 1 juta konsumen setiap harinya. Koperasi yang beranggotakan sekitar 500 ribu orang ini mempekerjakan lebih dari 5 ribu karyawan.

Selain menjadi yang terbesar dalam jaringan supermarket, NTUC Fairprice juga selalu terdepan dalam hal pengembangan bisnisnya. Fairprice Group melakukan berbagai terobosan atau inovasi dengan mendirikan toko yang secara khusus melayani segmen konsumen tertentu. Misalnya, toko yang khusus menyediakan makanan halal untuk konsumen muslim; atau yang hanya menyediakan beragam produk eksotis dari negara (lain, seperti Thailand, Australia, Cilet Hungaria, Afrika Selatan, dan sebagainya. Toko-toko khusus tersebut diberi nama berbeda. Misalnya, Thai Street at FairPrice Johor, Australian Pavilion, dan lainnya Cengkraman bisnis Fairprice di negeri yang hanya berpenduduk sekitar 3,5 juta jiwa itu semakin kuat ketika merambah bidang pergudangan dan distribusi yang dibangun secara terpusat dan diberi nama Grocery Logistic of Singapore. Langkah yang diayunkan pada 1998 lagi-lagi menempatkan Fairprice sebagai jaringan supermarket pertama di Singapura yang memiliki sistem distribusi dan pergudangan sendiri.

Pengembangan sayap bisnis NTUC Fairpricejuga dilakukan dengan membentuk berbagai format pelayanan, seperti tampak pada Liberāl Market, Cheers Convenience Store, FairPrice Xpress, The Pasar, FairPrice Homemart, FairPrice Online, dan sebagainya. Pengembangan layanan khusus tersebut dilakukan sejak 1990; sejalan dengan langkah pengembangan yang dilakukan besar-besaran pada seluruh supermarket dan toko sehingga menghasilkan supermarket generasi terbaru yang menciptakan kenyamanan dan pelayanan dengan standar lebih tinggi. Sebagai contoh, pengembangan department store yang khusus menyediakan bahan makanan segar ke sebuah konsep yang disebut The Pasar, yang menggabungkan konsep pasar basah tradisional dengan pasar modern yang nyaman dan bersih.

Pada Desember 2006, Fairprice kembali melakukan inovasi dengan membuka gerai hypermarket yang berdiri megah di daerah Ang Mo Kio. Hipermarket yang diberi nama Fairprice Xtra ini merupakan hypermarket pertama yang didirikan NTUC Fairprice. NTUC Income tercatat berada di peringkat 162 koperasi terbaik dunia, sementara koperasi Fairprice yang bergerak dibidang ritel masuk di dalam peringkat 218.

➤ INDIA

Berdirinya koperasi di India oleh pemerintah awalnya bertujuan untuk melindungi petani dari jeratan tengkulak dengan cara mendirikan koperasi kredit, yaitu Kutu Cittu dan Nidhis. Kutu Cittu merupakan perkumpulan beberapa orang yang membuat kesepakatan untuk waktu tertentu dengan cara mengumpulkan sejumlah uang (umumnya INR 10) yang akan diundi setiap jangka waktu tertentu sesuai jumlah anggota yang terlibat dalam Kutu Cittu. Nidhis merupakan perkumpulan yang hampir mirip dengan Kutu Cittu, tetapi dalam praktiknya, uang yang dikumpulkan dimaksudkan untuk dipinjamkan bagi anggota yang membutuhkan dengan memberikan kesempatan anggota meminjam hanya 1 kali dalam

putaran waktu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1901 dan dipelopori oleh Sir Antony MacDonnell, didirikan koperasi dengan model Raiffeisen di India.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Sebuah koperasi ternama di India, yakni Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF) yang menjadi perusahaan pengolah makanan dan minuman, terutama yang terbuat dari susu, terbesar di India dengan menggunakan nama dagang Amul. Berkat prestasinya ini, Amul mendapat penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Berbagai produk mereka dipasarkan di berbagai negara, seperti negara-negara Amerika, Eropa, Tiongkok, Australia, Singapura, Hongkong, dan Afrika Selatan. Organisasi koperasi Amul terdiri dari 3 tingkat (Djabaruddin Djohan, 2009), yaitu:

1. Tingkat pertama (primer) adalah perkumpulan koperasi pada tingkat desa (cooperative village society) yang beranggotakan para petani/peternak produsen susu. Fungsi utama dari koperasi primer ini adalah membeli susu segar dari para anggotanya untuk selanjutnya dijual kepada koperasi tingkat distrik. Pada 2007, terdapat 12.792 koperasi primer yang beranggotakan 2,6 juta orang. Setiap koperasi primer ini dikelola oleh 9 orang pengurus yang dipilih secara demokratis.
2. Tingkat kedua (sekunder) adalah koperasi distrik yang jumlahnya 13 koperasi di seluruh Gujarat. Fungsi utamanya adalah mengolah susu menjadi berbagai produk dan memasarkannya pada tingkat lokal. Kelebihan produknya disetorkan ke koperasi tingkat negara bagian GCMMF untuk selanjutnya dipasarkan pada tingkat nasional dan internasional. Setiap koperasi tingkat distrik dikelola oleh 15 orang pengurus yang dipilih secara demokratis dari para ketua koperasi tingkat primer-pedesaan.
3. Tingkat ketiga (tersier) adalah koperasi tingkat negara bagian, yaitu GCMMF yang bertanggung jawab terhadap pemasaran susu dan produk dari susu yang telah diolah pada tingkat nasional maupun internasional. Koperasi ini dikelola oleh dewan pengurus yang dipilih secara demokratis oleh dan dari para ketua koperasi tingkat distrik.

Ketiga tingkat koperasi Amul membentuk suatu mata rantai sejak produksi, mulai dari bahan baku hingga ke produk akhir, untuk dijual kepada konsumen. Setiap fungsi dalam proses tersebut melibatkan 2,6 juta orang produsen susu segar, 35.000 orang pekerja di 15 buah pabrik susu, 750 orang tenaga pemasar profesional, 10.500 orang pemasar pada jaringan distribusi, dan 600.000 orang pemasar pada jaringan ritel. Dari 2,6 juta orang anggota koperasi susu tersebut, terkumpul rata-rata 10,16 juta liter susu per harinya.

Dari kegiatan ekonomi ketiga tingkat organisasi koperasi susu tersebut pada 2006/2007 turnover koperasi Amul mencapai US\$ 1.050 juta. Menurut catatan Global 300 List ICA, turnover Amul mencapai US\$670 juta dan aset sebesar US\$ 11 juta pada tahun 2005. Hal tersebut menempatkannya pada peringkat 295 dari 300 koperasi terbaik dunia versi ICA.

Di India, terdapat dua koperasi yang masuk ke dalam peringkat 300 koperasi terbaik dunia, yaitu Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) dan Markfed Andhra Pradesh.

➤ **MALAYSIA**

Awal pendirian koperasi di Malaysia diperkenalkan oleh Sir Arthur Young pada tahun 1907. Namun masyarakat kurang dapat menerima ide dan cara kerja koperasi karena dianggap mengandung unsur riba dalam urusan pinjam-meminjam yang diperkenalkan.

Saat ini, tercatat sebanyak 5,9 juta orang atau 24% dari jumlah penduduk Malaysia menjadi anggota koperasi. Selain itu, terdapat hampir 5.004 koperasi yang mampu mengakumulasi dana sebesar RM 42,5 triliun pada 2007. Malaysia mencatatkan koperasi terbaiknya dalam koperasi terbaik dunia versi ICA 2012, yaitu Bank Kerja Sama Malaysia (Bank Rakyat) yang menduduki peringkat 245.

6. Gagasan dan Gerakan Koperasi di Indonesia

Sejarah awal lahirnya koperasi di Indonesia dipelopori oleh seorang patih di Karesidenan Purwokerto yang bernama Raden Aria Wiriaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 dengan merintis pendirian suatu bank simpanan (Hulp en Spaarbank), yaitu De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Irlandsche (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto). Pendirian bank ini adalah untuk menolong pada pegawai negeri yang terjerat utang dari kaum lintah darat. Usaha Raden Aria ini mendapat dukungan dari seorang asisten residen Belanda yang bertugas di Purwokerto, yaitu E. Sieburgh. Pada tahun 1898, ide Raden Aria ini diperluas oleh De Wolff van Westerrode sebagai pengganti E. Sieburgh. Bank tersebut dalam perjalanannya tidak hanya membantu pegawai negeri saja, tetapi juga petani dan pedagang kecil, seperti cita-cita Raiffeisen dan Schultze-Deliüsch. Akan tetapi, cita-cita dan ide Raden Aria tidak dapat berlanjut karena mendapat rintangan dan hambatan sebagai akibat kegiatan politik pemerintah Belanda saat itu. Bank yang dirintis Raden Aria ini sekaligus merupakan cikal bakal berdirinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu bank yang dimiliki pemerintah Indonesia.

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan nasional pada tahun 1908, gerakan Boedi Oetomo kembali mencoba memajukan koperasi melalui koperasi rumah tangga dan koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Gerakan yang dilakukan oleh Boedi Oetomo tersebut diperkuat oleh Sarikat Islam dengan melahirkan koperasi pertama di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya gerakan kebangkitan nasional di seluruh pelosok Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan koperasi tidak berjalan baik karena adanya tekanan dan hambatan dari pihak penguasa. Pemerintah Belanda khawatir tumbuh kembang koperasi akan berdampak pada gerakan perlawanan rakyat kepada pihak

penjajah. Untuk mengantisipasi gerakan tersebut dan agar perkembangan koperasi tidak semakin meluas, maka pada tahun 1914, pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Verordening op de Cooperatieve Verenigingen.

Dalam praktiknya, undang-undang ini justru bertentangan dengan prinsip koperasi dan corak hidup rakyat Indonesia, serta membatasi gerakan rakyat untuk berkoperasi sehingga lahirnya undang-undang ini mendapat kritikan dan tantangan keras dari kaum nasionalis saat itu. Dikarenakan kuatnya penentangan masyarakat terhadap Verordening op de Cooperatieve Verenigingen, pada tahun 1920, atas desakan tokoh-tokoh nasionalis, maka pemerintah Belanda membentuk panitia koperasi yang dipimpin oleh Prof. J. H. Boeke. Tugas panitia koperasi adalah pertama, mempelajari apakah bentuk koperasi sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak; kedua, mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan koperasi jika koperasi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia; dan ketiga, menyiapkan undang-undang koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Berdasarkan kerja panitia yang dipimpin Prof. Boeke ini, dihasilkan dua keputusan penting yang ditindaklanjuti pemerintah Belanda, yaitu lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang perkoperasian pada tahun 1927 yang diperuntukkan khusus bagi golongan bumiputra dan dibentuknya jawatan koperasi yang dipimpin Prof. Boeke di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Dengan dikeluarkannya undang-undang baru, maka semangat berkoperasi rakyat Indonesia kembali bangkit. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya koperasi-koperasi lain, seperti koperasi perikanan, koperasi kredit, dan koperasi kerajinan selain koperasi-koperasi yang sudah pernah ada.

Setelah Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, nomenklatur koperasi berubah menjadi syomin cou jumosyo, sedangkan kantor daerah diganti menjadi syomin kumiai sodandyo. Di Jawa, dibentuk panitia susunan perekonomian baru (Jawa yumin keizei sintaisei konsetsu junbi iinkai). Hasil perekonomian baru yang dikemukakan secara muluk-muluk, tidak lain adalah kesengsaraan dan kemelaratan semata.

Meskipun penjajahan bangsa Jepang berlangsung kurang lebih tiga setengah tahun, tetapi, penjajahan tersebut menimbulkan malapetaka yang lebih dahsyat daripada penjajahan Belanda sebelumnya. Kekayaan alam Indonesia dikuras oleh tentara Jepang. Mereka membeli padi dan bahan pangan lain dengan paksaan dan dengan harga yang sudah ditetapkan secara sewenang-wenang. Bagi yang berani menolak, hukuman dan siksaan menanti mereka. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi yang ada diubah menjadi Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang tentara Jepang.

CATATAN DAN FAKTA KOPERASI DAN UMKM

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat tergantung pada kondisi perpolitikan atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Baik pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, maupun pada saat Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka pun, perkembangan koperasi berbeda antarperiode pemerintahan, baik pada orde lama, orde baru, maupun pada orde reformasi. Namun, hal yang patut kita catat adalah perkembangan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Bung Hatta yang memasukkan watak koperasi dalam beberapa pasal terkait persoalan sosial dan ekonomi dalam UUD 1945.

Gerakan Koperasi Setelah Kemerdekaan

Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa semangat baru bagi rakyat Indonesia untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. Semangat baru ini tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, gerakan koperasi di seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu keputusan dari kongres tersebut adalah ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi Indonesia.

Dua tahun setelah kongres pertama koperasi, peraturan koperasi tahun 1933 diubah dengan Regeling Cooperatieve Verenigingen pada tahun 1949. Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres yang kedua, dengan salah satu keputusannya menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada hari ditetapkannya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta menyampaikan amanatnya (1971). Isi sambutan Bung Hatta tersebut menekankan bahwa koperasi haruslah dibangun secara merata di seluruh wilayah Indonesia guna memfasilitasi para petani, peternak, nelayan, serta pengrajin dalam menjalankan usahanya. Bung Hatta juga kembali mengingatkan pentingnya peran koperasi sebagai suatu gerakan perekonomian rakyat yang dapat membantu menyejahterakan masyarakat. Beliau pun mengingatkan bahwa kita janganlah puas dengan segala capaian koperasi beberapa tahun belakangan karena masih banyak hal yang harus dilakukan pada masa yang akan datang sampai koperasi Indonesia dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk membiayai dirinya sendiri (self-financing).

Bung Hatta juga menjelaskan bahwa masyarakat kita kekurangan modal untuk menyelenggarakan berbagai usaha pembangunan. Rencana transmigrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kekurangan biaya. Perlu ada panduan kapital dalam masyarakat kita sendiri. Salah satu jalan untuk mencapai panduan kapital itu ialah menyimpan. Oleh karena itu, gerakan koperasi Indonesia menggerakkan Pekan Tabungan

Rakyat setiap tahunnya pada hari koperasi Indonesia. Selama sepekan, rakyat didorong untuk menyimpan, terutama dalam lingkungan koperasi sendiri.

Kegiatan menabung harus diperbesar dan diperluas ke luar lingkungan koperasi sampai ke seluruh lingkungan rakyat. Selain Pekan Tabungan Rakyat, dianjurkan dan dipropagandakan agar seluruh rakyat menabung secara teratur, yaitu dengan menyimpan secara rutin setiap minggu dengan jumlah tertentu menurut kesanggupan setiap orang. Selain itu, setiap koperasi hendaklah bersedia mengorganisasi dan menerima simpanan rakyat, asal dipenuhi syaratnya, yaitu simpanan teratur setiap minggu dengan jumlah tertentu.

Bung Hatta berpendapat bahwa majunya suatu koperasi sebagian besar bergantung kepada koder pemimpin yang jujur dan cakap. Oleh karena itu, gerakan koperasi hendaklah mengambil inisiatif, seperti mengadakan Sekolah Menengah Koperasi yang sederajat dengan SMA yang daftar pelajarannya sesuai dengan cita-cita koperasi. Memang ada Sekolah Menengah Ekonomi yang sederajat dengan SMA, tetapi sifatnya banyak menuju kepada perdagangan. Perdagangan bukan tujuan bagi koperasi, melainkan tujuan dari ekonomi dagang, walaupun banyak terdapat dasar-dasar keekonomian yang sama di dalamnya. Pendidikan koperasi harus banyak berdasar kepada humanisme dan pengertian tentang gotong-royong dalam sejarah dan perkembangannya.

Amanat Bung Hatta pada tanggal 12 Juli 1957 ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sejatinya berkoperasi. Koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang dibangun dari kekuatan rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.



Dikarenakan perkembangan politik yang disesuaikan dengan UUD Sementara Tahun 1950, pada tahun 1958, pemerintah mengeluarkan UU Koperasi No. 79 Tahun 1958. Dengan dikeluarkannya UU ini, maka peraturan koperasi tahun 1933 dan peraturan koperasi tahun 1949 dinyatakan batal. Diberlakukannya No. 79 Tahun 1958 yang berdasar pada UUDS 1950 Pasal 50 membuat perkembangan koperasi dirasa semakin baik dengan dijadikannya koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya adalah mengembalikan UUD kepada UUD 1945. Dengan kondisi ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60

Tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No. 79 Tahun 1958. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa pemerintah adalah pembina dan pengawas koperasi. Pada masa ini, segala kegiatan pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jawatan koperasi, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tugas jawatan koperasi berdasarkan UIJ No. 79 Tahun 1959 di antaranya adalah menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian dan mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.

Guna menumbuhkembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 yang muatannya antara lain adalah harus ada kerja sama antara jawatan dengan masyarakat dalam suatu lembaga yang disebut dengan Badan Penggerak Koperasi yang disingkat Bapengkop. Dibentuknya Bapengkop dimaksudkan agar cita-cita ekonomi Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu LUD 1945. Di samping itu, Bapengkop juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa gerakan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat betul-betul dijalankan di seluruh pelosok tanah air.

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada masa itu membuat koperasi bergantung kepada bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa mengharap datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah. Akibatnya, mereka menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi dan menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Selain itu, campur tangan partai-partai politik pada pengelolaan koperasi mengakibatkan koperasi menjadi alat perjuangan politik dari kelompok kekuatan tertentu. Koperasi menjadi kehilangan jati dirinya dan keluar dari patron prinsip koperasi yang terbebas dari kepentingan politik, agama, suku, dan sebagainya.

Pada tanggal 24 April 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi Indonesia yang pertama di Surabaya. Munas tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi pertama dan kedua dari seluruh Indonesia, maupun induk gabungan koperasi tingkat nasional dan wakil-wakil pemerintah. Namun, munas ini ternyata belum dapat memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idelnya. Munas I Koperasi Indonesia gagal mengembalikan jati diri koperasi. Berselang 4 tahun, kembali diadakan Munas Koperasi kedua, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1965, yang kemudian melahirkan UU No.4 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia.

Meskipun Munas koperasi kedua telah melahirkan UU Koperasi sebagai payung hukum koperasi, tetapi kenyataan menunjukkan pengaruh politik masih sangat dirasakan dalam koperasi dengan masuknya unsur-unsur politik dalam koperasi. Dengan kata lain, koperasi masih dijadikan alat perjuangan bagi partai-partai politik yang berkuasa. Intervensi pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian justru membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian dan tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dengan penjelasannya.

Pada tahun 1966, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS mencabut dan mengganti UU No. 14 Tahun 1965 dengan UU baru yang benar-benar dapat menempatkan

koperasi pada fungsi utamanya, yakni sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33. Berkaitan dengan itu, Munas Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) pertama pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta menetapkan:

1. Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskop I dan II.
2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang telah membekukan UU No. 14 1965.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pada masa-masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui Departemen Perdagangan dan Koperasi, dibentuklah panitia peninjauan UU Nomor UU Tahun 1965 yang dipimpin oleh Ibnuoe Soejono. Selanjutnya pada 18 Desember 1967, pemerintah dengan persetujuan DPR Gotong-Royong (DPRGR) berhasil membuat UU tentang Pokok-Pokok Perkoperasian No. 12 Tahun 1967.

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1967 ini, maka koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan; terutama menyangkut koperasi yang tidak berbadan hukum, dibuatkan atau dijadikan sebagai koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya pada masa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I, pemerintah telah mendirikan berbagai program penguatan koperasi. Program-program tersebut di antaranya adalah: pertama, membuat Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta; kedua, membuat Balai Latihan Perkoperasian (Balatkop) di setiap provinsi sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagi anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manajer koperasi, karyawan, dan bahkan calon anggota koperasi; ketiga, membuat Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di Jakarta dengan kegiatan membantu permodalan koperasi di setiap provinsi dengan cara menjadi penjamin koperasi atas pinjaman yang diperoleh dari bank pemerintah; dan keempat, membuat berbagai program penguatan koperasi, di antaranya pembentukan Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), dan berbagai program lainnya.

Khusus menyangkut KUD, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/KUD. Sejak saat itu, BUUD yang semula merupakan bentuk antara, dilebur menjadi KUD dan dipisahkan dari struktur BUUD. BUUD tidak lagi merupakan lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi seperti diatur dalam Inpres No. 4 Tahun 1973, tetapi berfungsi sebagai lembaga pimpinan, pendorong, dan pelopor pengembangan, serta pembinaan KUD. BUUD dibentuk berdasarkan adanya KUD dan mempunyai wilayah kerja yang sama dengan KUD, yaitu beberapa desa dalam satu kecamatan.

Pada tahap permulaannya, KUD hanya mencakup koperasi pertanian, koperasi desa, dan koperasi serba usaha pada tingkat desa. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, KUD telah mampu mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain, seperti bidang kerajinan rakyat, perkebunan, perkreditan, dan kegiatan penanganan masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan percengkehan nasional.

Keanggotaan KUD tidak didasarkan pada jenis usahanya, tetapi didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau anggota. Apabila di suatu daerah kecamatan telah berdiri koperasi-koperasi lain selain KUD, maka koperasi-koperasi tersebut boleh terus menjalankan kegiatan usahanya atau boleh bergabung dengan KUD atas kemauannya sendiri. Dengan diberlakukannya Inpres No. 4 Tahun 1984, maka Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang BUUD/ KUD tidak berlaku lagi. KUD dibentuk oleh warga desa dari SUQtU desa atau kelompok desa-desa, yang disebut unit desa, yang dapat merupakan satu kegiatan ekonomi masyarakat terkecil.

Pada tanggal 21 Oktober 1992, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang PokokPokok Koperasi. Setelah jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi. Instruksi presiden ini merupakan pembatalan posisi KUD sebagai satu-satunya koperasi pedesaan. Melalui Instruksi Presiden No. 18 Tahun 1998/ pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja dan koperasi diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan kegiatannya tanpa campur tangan pemerintah serta terbebas dari berbagai kepentingan politik.

Namun sangat disayangkan, kebebasan yang diberikan pemerintah justru disalahartikan dengan membiarkan koperasi berjalan seperti apa adanya oleh pemerintah berikutnya, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Berbagai hambatan yang membuat koperasi tidak berkembang tidak diantisipasi oleh pemerintah. Hal yang terjadi justru swasta besarlah yang sering mendapat berbagai fasilitas.

Kronologi

Lembaga-lembaga yang menangani pembinaan koperasi sejak masa penjajahan hingga saat ini dapat diurutkan sebagai berikut (M. Iskandar Soesilo, 2008):

1930 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya di bawah Departemen Dalam Negeri dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi. Tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris.

1935 Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken dan dimasukkan dalam usaha hukum (Afdeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasihat.

1939 Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeling Algemeene Economische Aang/egenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandische Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi, tetapi juga meliputi perdagangan untuk Bumiputra.

1942 Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Pada masa penjajahan Jepang, jawatan koperasi diubah menjadi Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo dan kantor di daerah diberi nama Syomin Kumiai Djimusyo.

1944 Didirikan Jumin Keizai-kyo (Kantor Perekonomian Rakyat) dan urusan koperasi menjadi bagiannya dengan nama Kumaika. Tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.

1945 Koperasi masuk dalam tugas Jawatan Koperasi serta Perdagangan Dalam Negeri di bawah Kementerian Kemakmuran.

1946 Urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada jawatan perdagangan, sedangkan jawatan koperasi berdiri sendiri mengurus soal koperasi.

1947-1948 Jawatan koperasi berada di bawah pimpinan R. Suria Atmadja. Pada masa ini, ada suatu peristiwa yang cukup penting, yaitu Gerakan Koperasi mengadakan kongres di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 dan hasil kongres menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dinyatakan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

1949 Pusat Jawatan Koperasi RIS berada di Yogyakarta. Tugasnya adalah mengadakan kontak dengan jawatan koperasi di beberapa daerah lainnya. Tugas pokok yang dihasilkan membuat tugas dan fungsi bank dan lumbung desa dialihkan kepada koperasi. Pada tahun yang sama, diundangkan Regeling Cooperatieve 1949 Ordina 7 Juli 1949 (SBT. No. 179). 1950 Jawatan Koperasi RI yang berkedudukan di Yogyakarta digabungkan dengan Jawatan Koperasi RIS dan berkedudukan di Jakarta.

1954 Pembina koperasi masih tetap diperlukan oleh jawatan koperasi di bawah pimpinan Rusli Rahim.

1958 Jawatan koperasi menjadi bagian dari Kementerian Kemakmuran.

1960 Perkoperasian dikelola oleh Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) di bawah pimpinan Achmadi.

1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi dan tetap berada di bawah pimpinan Menteri Achmadi.

1964 Departemen Koperasi diubah menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi di bawah pimpinan Menteri Achmadi yang kemudian diganti oleh Drs. Achadi. Direktur Koperasi di bawah pimpinan seorang Direktur Jenderal bernama Chodewi Amin yang menjabat untuk periode 1966-2004.

1966 Departemen Koperasi kembali berdiri sendiri dan dipimpin oleh Pang Suparto. Pada tahun yang sama, Departemen Koperasi diubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi di bawah pimpinan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sedangkan Direktur Jenderal Koperasi dijabat oleh Ir. Ibnoe Soedjono (dari tahun 1960-1966).

1967 Diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian pada tanggal 18 Desember 1967. Koperasi masuk dalam jajaran Departemen Dalam Negeri dengan status Direktorat Jenderal Mendagri dijabat oleh Basuki Rachmad.

1968 Kedudukan Direktorat Jenderal Koperasi dilepas dari Departemen Dalam Negeri dan digabungkan ke dalam jajaran Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Hal ini ditetapkan berdasarkan: (1) Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968 tentang Susunan Organisasi Departemen dan (2) Keputusan Menteri Transmigrasi dan Koperasi Nomor 120/KTS/Mentranskop/1969 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi beserta Tata Kerja Direktorat Jenderal Koperasi. Menjabat sebagai Menteri Transkop adalah M. Sarbini/ sedangkan Dirjen Koperasi tetap Ir. Ibnu Soedjono.

1974 Direktorat Jenderal Koperasi kembali mengalami perubahan, yaitu digabung ke dalam jajaran Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi yang ditetapkan berdasarkan: (1) Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi serta (2) Instruksi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Nomor INS-19/MEN/1974 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi tidak ada perubahan (tetap memberlakukan Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor 120/KPTS/Mentranskop/ 1969) yang berisi Penetapan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Koperasi. Menjabat sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Subroto.

1978 DirektoratJenderal Koperasi masuk ke dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi dengan Drs. Radius Prawiro sebagai menterinya. Untuk memperkuat kedudukan koperasi, dibentuk pula Menteri Muda Urusan Koperasi yang dipimpin oleh Bustanil Arifin, S. H. Sementara itu, Dirjen Koperasi dijabat Oleh Prof. Soedjanadi Ronodiwiryo.

1983 Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi, koperasi melangkah maju di berbagai bidang dengan memperkuat kedudukannya dalam pembangunan. Pada Kabinet Pembangunan IV, Direktorat Jenderal Koperasi ditetapkan menjadi Departemen Koperasi melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983 tertanggal 23 April 1983.

1991 Melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 tertanggal 10 September 1991 , terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Koperasi yang disesuaikan keadaan dan kebutuhan.

1992 Diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

1993 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas Departemen Koperasi bertambah dengan membina pengusaha kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar karena secara fundamental, golongan

ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan harus ditangani secara mendasar mengingat perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

1996 Dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali terhadap susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, dan Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta nomenklaturnya agar dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung secara optimal.

1998 Dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan VII, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tertanggal 14 Maret 1998 dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis untuk mempersiapkan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh dan kuat bagi koperasi dan pengusaha kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi yang penuh tantangan.

1999 Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tertanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Kementerian Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

2000 Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tertanggal 7 April 2000, ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil-Menengah.

Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tertanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM). Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tertanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara menetapkan Menteri Negara Koperasi dan PKM diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tertanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara menetapkan bahwa Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

2001 Melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikukuhkan kembali. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non-Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan

Pengusaha Kecil-Menengah dibubarkan. Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tertanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara menetapkan bahwa Menteri Negara Koperasi dan UKM membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga saat ini.

Patut disadari, pengalaman panjang sejarah perkoperasian di Indonesia ternyata belum memberikan harapan yang berarti bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di republik ini, khususnya UMKM. Koperasi dalam pandangan awam lebih kepada gerakan sosial daripada gerakan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya fasilitas dan kesempatan untuk mengakses berbagai potensi sumber-sumber ekonomi yang diperuntukkan bagi usaha besar dan BUMN dibandingkan dengan koperasi. Sebut saja bantuan likuiditas bank yang telah menggerogoti keuangan negara, pemberian kredit yang nyaris tanpa batas sehingga menjadi skandal ekonomi, berbagai subsidi bagi BUMN, pengelolaan HPH yang mencapai puluhan ribu hektar, dan lain sebagainya. Sementara bagi koperasi dan UMKM, berbagai alokasi sumber-sumber ekonomi sangat terbatas.

Keberadaan koperasi yang diharapkan menjadi Pilar atau saka guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya (Tulus Tambunan, 2008). Kenyataan ini dapat kita catat dengan tidak masuknya koperasi Indonesia di dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA.

TUGAS

Soal berikut ini adalah tentang Gagasan dan Gerakan Koperasi di Eropa, Selandia Baru dan Australia, Amerika, Afrika, Asia, dan Indonesia.

Sehubungan dengan materi tersebut. Diskusikan dan berikan jawaban atas pertanyaan di bawah ini, berlaku untuk masing – masing negara. Jawablah 5 poin pertanyaan ini dengan menggunakan tabel untuk gabungan seluruh negara (20 negara).

1. Berikan alasan apa sajakah yang termasuk gagasan dan gerakan koperasi
2. Dimulai sejak tahun berapa Koperasi dibangun?
3. Konsep penggolongan koperasi seperti apa yang dijalankannya
4. Koperasi yang digagas dimulai dari aspek / bidang ekonomi apa?
5. Kemudian berkembang menjadi bidang apa sajakah koperasinya?

Analisis negara – negara sebagai berikut :

- Eropa : Jerman, Swedia, Denmark, Prancis, Italia, Rusia, Norwegia
- Selandia Baru dan Australia
- Amerika : Amerika Serikat, Kanada
- Afrika : Kenya, Republik Afrika Selatan
- Asia : Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, India, Malaysia, Indonesia